

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Kajian Normatif Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sengketa Tanah Negara. Dalam kebijakan Badan Pertanahan Nasional terdapat penyelesaian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria serta untuk mengetahui beberapa kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam menghadapi sengketa tanah negara di kalangan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan ialah teknik diskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian ialah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kajian Normatif Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sengketa Tanah Negara belum maksimal sehingga masih perlu dioptimalkan. Secara keseluruhan dapat dilihat dari beberapa kendala yakni dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui peranan Badan Pertanahan Nasional untuk meminimalisir terjadinya sengketa terhadap tanah negara dimasyarakat dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPN dalam rangka penyelesaian sengketa tanah negara yang rawan terjadi permasalahan dikalangan masyarakat.

Adapun kegunaan ilmiah dalam skripsi ini yaitu dapat menjadi bahan studi perbandingan yang menjadi sumbangan pemikiran ilmiah pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : Kebijakan Badan Pertanahan Nasional; Sengketa Tanah Negara.